

TESIS

DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA DETERMINANTS OF POVERTY RATES IN INDONESIA

MUTMAINNAH

A032211004



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA DETERMINANTS OF POVERTY RATES IN INDONESIA

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

MUTMAINNAH

A032211004



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

MUTMAINNAH
A032211004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian
Studi Program Magister **Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

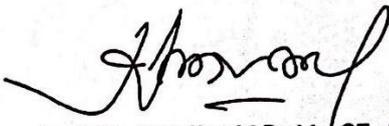
pada tanggal **06 Februari 2023**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



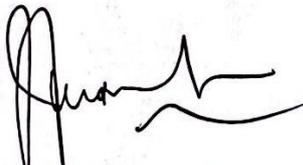
Prof. Dr. Abd. Hamid Paddy, SE., MA., CRP
NIP. 19590306 198503 1 002



Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF
NIP. 19681221 199512 1 001

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE., MA., CWM®
NIP. 19651012 199903 2 001



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 19640205 198810 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainnah

NIM : A032211004

Program Studi : Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Dengan menyatakan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul: “**Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia**” adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/terbitkan sebelumnya, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Februari 2023

Yang menyatakan,

A 1000 Rupiah adhesive stamp (Meterai Tempel) with a signature and the name Mutmainnah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '9922BAKX315867529'.

Mutmainnah

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salam dan shalawat senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas sunnah dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia”**.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan di Indonesia serta masih ditematkannya sebagai isu utama ditunjukkan dengan ditematkannya isu kemiskinan sebagai tujuan pertama dalam SDGs, untuk mewujudkan tercapainya no poverty pada tahun 2030, penulis bermaksud menyumbangkan konsep untuk menyikapi kemiskinan di Indonesia. Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, dan berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihaklah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu. SE., MA., CRP sebagai pembimbing utama dan bapak Dr. Hamrullah. SE., M.Si., CSF sebagai pembimbing pendamping, atas waktu dan perhatian yang telah diberikan untuk membimbing, memberi motivasi, sumbangsih saran dan kritiknya serta diskusi-diskusi edukatif yang banyak memberikan pengalaman dan pencerahan kepada peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir SE.,M.Si.,CIPM. Beserta para wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada ibu Dr. Indraswati Tri Abdireviane SE.,MA., CWM® selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menjalani studi hingga selesai. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen pengampu pada Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin dan kepada seluruh anggota tim penguji: Bapak Dr. Abd. Rahman Razak, SE., M.S, Bapak Dr. Sanusi, SE.,M.Si dan Ibu Dr.

Retno Fitrianti, SE,.M.Si yang telah meluangkan waktu dalam meneliti keabsahan dan memberikan saran dan kritik yang positif sehingga tesis ini dapat selesai.

Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Pascasarjana Ekonomi Universitas Hasanuddin yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan urusan-urusan akademik. Penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman MEPP angkatan 2021 yang telah membantu penulis semasa perkuliahan. Serta teman-teman di luar lingkungan kampus yang terus mensupport penulis.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan kedua orang tua, Ayahanda Muh. Fadjeri, serta Ibunda Hasmiati (Almarhumah) yang dalam mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis. Serta kakak dan adikku atas segala doa, pengorbanan, kesabaran dan perhatiannya dalam kebersamaan keluarga, sejak awal dan sampai saat terakhir penulis menempuh pendidikan Program Magister.

Semoga tesis ini bermanfaat dalam khasanah pengembangan ilmu pengetahuan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam karya akademik ini, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala aktifitas dan amal usaha kita. Aamiin.

Makassar, 22 Februari 2023

Mutmainnah

ABSTRAK

MUTMAINNAH. *Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia* (dibimbing oleh Abd. Hamid Paddu dan Hamrullah).

Kemiskinan bukanlah masalah baru, akan tetapi sampai saat ini masih menjadi isu utama. Hal itu ditunjukkan dengan ditematkannya isu kemiskinan sebagai tujuan pertama dalam SDGS. Di situ dinyatakan *no poverty* yang menjadi poin prioritas SDGS, sehingga untuk mewujudkan tercapainya *no poverty* pada tahun 2030 perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan determinan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dan upah minimum provinsi terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Penelitian ini menggunakan data panel 34 Provinsi di Indonesia selama enam tahun (2015-2020). Metode yang digunakan, yaitu regresi data panel. Adapun hasil penelitian, yaitu pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh terhadap kemiskinan dan secara tidak langsung melalui pengangguran berpengaruh. Akan tetapi, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh terhadap kemiskinan, akan tetapi secara tidak langsung baik melalui pertumbuhan maupun pengangguran tidak berpengaruh. Upah minimum provinsi secara langsung berpengaruh terhadap kemiskinan dan secara tidak langsung melalui pengangguran berpengaruh, akan tetapi secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh.

Kata kunci: pengeluaran pemerintah, investasi, upah minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan



ABSTRACT

MUTMAINNAH. *Determinants of Poverty Rates in Indonesia* (supervised by Abd. Hamid Paddu and Hamrullah)

Poverty is not a new problem, but until now it has become a major issue indicated by the placement of the issue of poverty as the first goal in the SDGS. It is stated that no poverty is the priority point of the SDGs, so in order to realize the achievement of no poverty in 2030, it is necessary to carry out further research related to the determinants of poverty in Indonesia. Therefore, this study aims to analyze the effect of government spending, investment, and provincial minimum wage on poverty both directly and indirectly through economic growth and unemployment. This study was conducted in 34 provinces in Indonesia for 6 years (2015- 2020). The method used was panel data regression. The results of the study show that government spending directly affects poverty and indirectly has effect through unemployment but government spending does not affect poverty through economic growth. Investment has an indirect effect on poverty through growth but unemployment has no effect. The provincial minimum wage directly affects poverty and it has indirect effect through unemployment. However, it has no indirect effect through economic growth.

Keywords: government expenditure, investment, provincial minimum wage, economic growth, unemployment, poverty.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Kemiskinan	13
2.1.2 Pengangguran.....	16
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	18
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah	19
2.1.5 Investasi	21

2.1.6 Upah	21
2.2. Hubungan Variabel	24
2.2.1 Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan.....	24
2.2.2 Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan.....	29
2.2.3 Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan	33
2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	36
2.2.5 Pengangguran dan Kemiskinan	38
2.3 Tinjauan Empiris	41
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	44
3.1 Kerangka Konseptual.....	44
3.2 Hipotesis.....	46
BAB IV METODE PENELITIAN	48
4.1 Jenis Penelitian	48
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
4.3 Jenis dan Sumber Data	48
4.4 Metode Analisis	49
4.5 Definisi Operasional.....	51
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Deskripsi Data	52
5.1.1 Kemiskinan.....	52
5.1.2 Pengangguran.....	53
5.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	54

5.1.4 Pengeluaran Pemerintah	55
5.1.5 Investasi	56
5.1.6 Upah Minimum Provinsi	57
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian	57
5.2.1 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel	57
5.2.2 Deskripsi Hasil Penelitian	59
5.2.3 Pengujian Hipotesis	61
5.3 Pembahasan	63
BAB VI PENUTUP	74
6.1 Kesimpulan.....	74
6.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	87

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	3
Grafik 1.2 Perkembangan Persentase Pengangguran	5
Grafik 5.1 Persentase Kemiskinan Per Provinsi Di Indonesia	52
Grafik 5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Per Provinsi Di Indonesia	53
Grafik 5.3 Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Di Indonesia	54
Grafik 5.4 Pengeluaran Pemerintah Per Provinsi Di Indonesia	55
Grafik 5.5 Investasi Per Provinsi Di Indonesia	56
Grafik 5.6 Upah Minimum Per Provinsi Di Indonesia	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Koefisien Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung	50
Tabel 5.7 Hasil Estimasi Model Terbaik	58
Tabel 5.8 Hasil Pengaruh Langsung Antar Variabel	59
Tabel 5.9 Hasil Pengaruh Tidak Langsung	59
Tabel 5.10 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan kemiskinan adalah salah satu masalah yang menjadi perhatian di Negara manapun baik maju maupun sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu target kebijakan pembangunan di setiap daerah di Indonesia agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil. Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental dan menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan berbagai jenis program pembangunan. Akan tetapi satu hal yang mengganggu pikiran kita jika dihadapkan dengan fenomena kemiskinan begitu banyak teori untuk menjelaskan dan memberikan solusi tentang penanggulangan kemiskinan, namun tidak dapat dipungkiri fenomena kemiskinan masih selalu ada di sekitar kita (Ubur, 2011). Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan, mengapa kemiskinan selalu ada? apakah teori yang ada tidak cukup untuk menjelaskan mengenai kemiskinan ? Apakah belum maksimal upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan ?

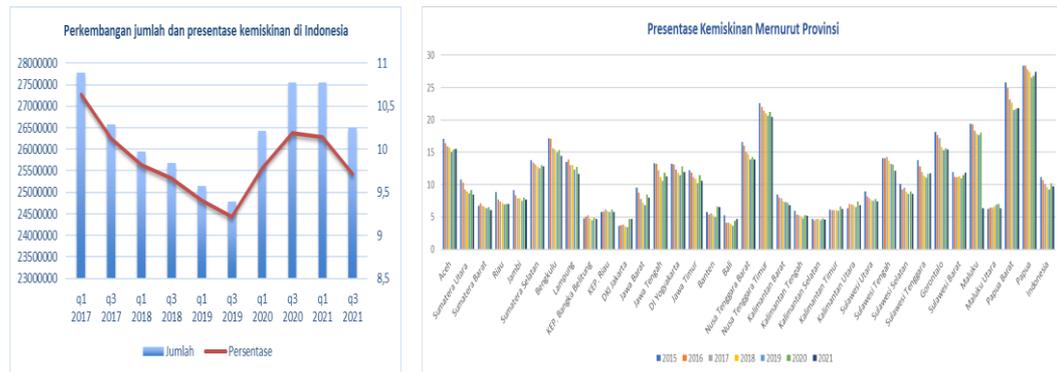
Kemiskinan memang merupakan istilah kontroversial dalam banyak bidang, dari beberapa sudut pandang itulah sebabnya dikatakan multidimensi, multisectoral dll. Beberapa orang berpandangan bahwa kemiskinan adalah dimata yang melihatnya. Beberapa menggambarkan kemiskinan sebagai gajah yang dapat dengan mudah dilihat tetapi sulit didefinisikan (Kware, 2015). Dalam RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, karenanya kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena

menyangkut beberapa hal antara lain: 1. kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; 2. menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (SDGS.Bappenas, 2022)

Kemiskinan bukanlah masalah baru akan tetapi sampai saat ini menjadi isu utama, ditunjukkan dengan ditempatkannya isu kemiskinan sebagai tujuan pertama dalam SDGs dinyatakan *no poverty* yang menjadi point prioritas SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, yang targetnya menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional dan internasional, yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin dan gender sensitive, untuk mempercepat investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan (SDG Indonesia,2022). Indonesia tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini dimana pada Labour20 dalam presidensi G20 yang diadakan januari 2022 juga mendorong penuntasan kemiskinan dan pengangguran serta memperjuangkan manfaat bagi kelompok rentan (www.ekon.go.id, 2022).

Permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Jika dilihat dari perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin, secara bertahap telah menurun sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini:

Grafik 1.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Indonesia



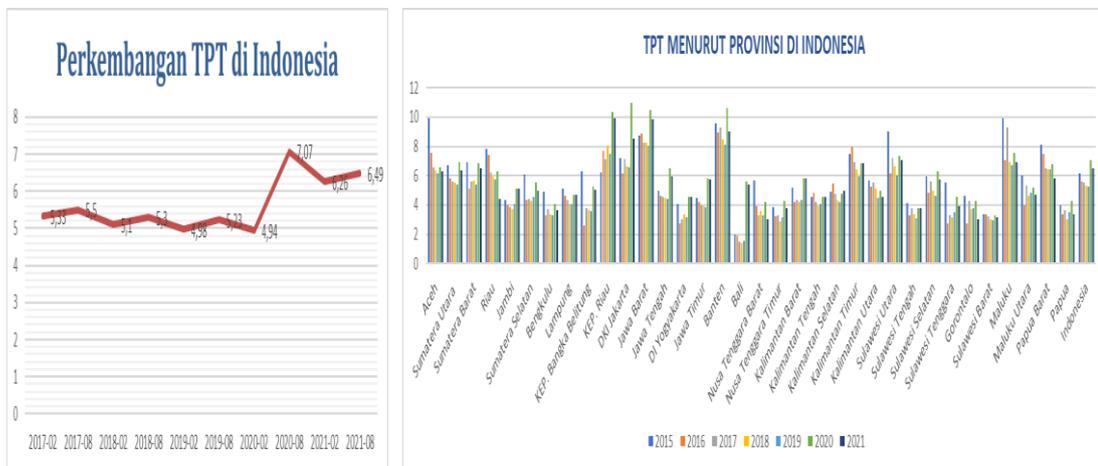
Sumber : Badan pusat statistik, (2015-2021).

Dari data di atas apabila kita bandingkan pada masing-masing kuartal, yang paling tinggi penurunannya maret 2017 dan 2018 yaitu 0,82%, untuk yang paling rendah penurunannya yaitu maret 2018 dan 2019 menurun 0,41%. Secara bertahap setelah pandemic covid-19 jumlah kemiskinan juga menurun bersamaan dengan persentase kemiskinan, dari data badan pusat statistik (BPS) walaupun 5 tahun terakhir menurun akan tetapi penurunannya cenderung melambat sehingga angkanya masih besar, walaupun pada tahun 2020 terjadi peningkatan akan tetapi jumlah dan persentase penduduk miskin masih lebih tinggi dibanding posisi sebelum terjadi pandemi Covid-19. Apabila kita melihat perkembangan persentase penduduk miskin Indonesia dan masing-masing provinsi, tingkat kemiskinan di provinsi masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Menurut BPS salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan kemiskinan di Indonesia yaitu kenaikan harga beras sehingga kecepatan penurunan kemiskinan tahun 2018 tidak secepat periode 2017. Salah satu hal yang menyebabkan kenaikan kemiskinan pada provinsi yaitu kebijakan yang dibuat pemerintah masih tidak membedakan ruang atau kondisi daerah, seperti halnya kebijakan tarif dasar listrik ataupun kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM) yang semua sama.

Kemiskinan terkait erat dengan ketiadaan aset dan akses yang ditandai oleh keterbatasan, ketidakmampuan, dan kekurangan (Ramli, Jamil, dan Karmila, 2020). Kemiskinan memiliki berbagai dimensi salah satunya dalam dimensi ekonomi yang ditandai dengan rendahnya pendapatan ataupun tidak memiliki pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Rendahnya pendapatan dan tidak ada pendapatan disebabkan karena tidak adanya pekerjaan, sehingga orang tersebut dikategorikan pengangguran. Kemiskinan membentuk sebuah lingkaran yang apabila tidak diputus maka akan kembali berulang. Secara *common sense* pengangguran akan berbanding lurus dengan kemiskinan karena ketidakmampuan akses untuk mendapat penghasilan dan penghidupan yang layak akan berdampak pada munculnya masalah kemiskinan (Handalani, 2019). Kemiskinan dan pengangguran seperti masalah kembar yang masih membingungkan arahnya apakah kemiskinan yang menyebabkan pengangguran ataukah sebaliknya, Menurut badan dalam Osinubi (2005), pengangguran telah diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama kemiskinan di sub Sahara Afrika. Paramita dan Purbadharmaja (2015); Feriyanto, et al. (2020); Puspita (2015); dan Nurdiana et al. (2020) hasil penelitiannya menunjukkan pengangguran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan akan tetapi Sumiyarti (2022) mengungkapkan pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, Akwara et al. (2013) meneliti hubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan ketidakamanan di Nigeria penelitian ini menemukan bahwa pengangguran menyebabkan kemiskinan, sedangkan kemiskinan menyebabkan ketidakamanan. Defina (2002) menyatakan bahwa keterkaitan antara pengangguran dan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemiskinan itu diukur. Menurut badan pusat statistik jika dilihat dari perkembangan tingkat

pengangguran terbuka Indonesia secara bertahap telah menurun sebagaimana ditunjukkan pada grafik dibawah ini :

Grafik 1.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Indonesia



Sumber : Badan pusat statistik,(2015-2021)

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2021 mencapai 6,49 persen, Jumlah ini lebih rendah dari pada TPT pada Agustus 2020. TPT Agustus 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2020. Saat itu, tingkat TPT mencapai 7,07 persen atau setara dengan 9,77 juta orang. Menurut BPS, trend pengangguran yang menurun sejalan dengan perbaikan ekonomi. Akan tetapi walaupun terjadi penurunan, angka penurunannya masih stagnan di angka yang besar. Betul bahwasanya pengangguran membaik dikarenakan menurun akan tetapi belum pulih, menurut Sukirno dalam Farid (2007) pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan, artinya apabila tingkat pengangguran paling tinggi 2-3% itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*Full Employemen*). Sejalan dengan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka pada provinsi masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Indonesia. Selain dari

pandemic, salah satu hal yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka masih tinggi yaitu karena penambahan jumlah pengangguran itu sendiri dan pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak seimbang.

Dari data kemiskinan dan pengangguran di atas tentunya trend naik turunnya jumlah kemiskinan dan pengangguran ini mengindikasikan kondisi perekonomian pada tahun tersebut. Semakin sedikit kemiskinan dan pengangguran menunjukkan kondisi perekonomian semakin baik (Ketaren, 2018). Badan pusat statistik mencatat bahwa Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen sejalan dengan trend kemiskinan dan pengangguran yang mengalami peningkatan pada periode tersebut. Untuk melihat kondisi perekonomian salah satu yang bisa dijadikan indikator yaitu hasil dari pertumbuhan ekonomi menyebar disetiap golongan masyarakat. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, karena pertumbuhan ekonomi juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Hal yang dikemukakan Godslove (2016) dan Fraumeni (2017) jika pertumbuhan GNP per kapita sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang tinggi berarti semakin banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, serta basis pajak yang lebih besar yang memungkinkan pemerintah berbuat lebih banyak untuk orang miskin.

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama dalam pengentasan kemiskinan, dan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang pro-poor (Tahir dan Hasan 2018). Menurut Obadan (Osinubi, 2005) meskipun

pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan, itu tidak cukup, karena pertumbuhan saja tidak dapat mengatasi semua faktor-faktor penting penyebab pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, namun biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Namun pertumbuhan ekonomi yang baik tidak akan mengakibatkan pengurangan jumlah penduduk miskin jika tidak dibarengi dengan pemerataan pendapatan (Misini dan Pantina, 2017).

Produksi yang lebih tinggi menghasilkan lapangan kerja yang lebih tinggi. Lapangan kerja yang lebih tinggi menyebabkan pengangguran yang lebih rendah. Pengangguran yang lebih rendah menyebabkan upah yang lebih tinggi. Upah yang lebih tinggi meningkatkan biaya produksi, menyebabkan perusahaan menaikkan harga. Harga yang lebih tinggi menyebabkan pekerja meminta upah yang lebih tinggi. Upah yang lebih tinggi menyebabkan kenaikan harga lebih lanjut, dan seterusnya (Blanchard dan Johnson 2017). Maka dari itu, tenaga kerja sebagai salah satu dari faktor produksi merupakan unsur yang penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi. Keterlibatannya dalam proses produksi menyebabkan mereka menginginkan pendapatan yang memadai, tingkat keamanan dan kenyamanan kerja, serta keuntungan lain yang dapat diperoleh (Tambunsaribu dan Mudakir 2013). Pengangguran adalah sekelompok pekerja yang tidak melakukan kegiatan apapun yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang bekerja tetapi pekerjaannya tidak produktif juga dapat dikategorikan sebagai pengangguran (Fahri, Jalil dan Kasnelly, 2020).

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang akan berdampak pada masalah sosial dan ekonomi dikarenakan pengangguran akan membuat seseorang masuk kedalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, karena menganggur biasanya mengakibatkan turunnya taraf hidup seseorang karena tidak adanya pendapatan, dan sangat mungkin bagi seseorang untuk bekerja dan tetap miskin (Mohammad dan David 2019). Osinubi (2005); Chen et al. (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ketika orang menjadi miskin mereka cenderung menerima pekerjaan dengan upah yang sangat rendah. Mekanisme utama terjadinya kemiskinan pekerja karena penghasilan rendah, sehingga tugas pertama pemerintah meningkatkan upah atau pendapatan pekerja (Faharuddin et al. 2022), sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah melalui kebijakannya, untuk itu salah satu kebijakan pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan adalah dengan kebijakan upah minimum yang diatur dalam UU ketenagakerjaan yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan dapat membantu penduduk miskin keluar dari kemiskinan. Akan tetapi apabila upah minimum tidak sesuai dengan meningkatnya kebutuhan hidup layak disuatu daerah maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah kemiskinan didaerah tersebut. Penelitian (Kurniawati, Gunawan, dan Ratna Indrasari 2017) upah minimum berdampak negative signifikan terhadap kemiskinan, setiap kenaikan upah 1% (*Ceteris paribus*) akan mengurangi kemiskinan 5,7%, yang juga sejalan dengan penelitian (Corolina dan Panjawa 2020).

Banyak yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan yaitu tingkatkan akses terhadap makanan, pelayanan dan Pendidikan untuk warga miskin. Ciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik untuk warga

miskin. Investasi pada jaring pengaman sosial untuk melindungi warga rentan (World bank, 2014). Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah terus naik dari tahun ke tahun dengan harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah juga tidak hanya melihat jumlahnya saja tapi juga melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah (Osinubi, 2005). Desentralisasi fiskal akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di sebuah daerah yang diharapkan mampu memajukan pembangunan sosial ekonomi bagi penduduk (Chibueze, 2011); (Akudugu, 2012).

Pengeluaran pemerintah merupakan instrument kebijakan fiscal yang bertujuan meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan (Ketaren, 2018). Adegboyo (2020) belanja sosial, belanja transfer mengurangi kemiskinan di Nigeria, sementara Mustamin, et al. (2015) belanja pemerintah berpengaruh negative terhadap kemiskinan di Makassar, pengeluaran pemerintah berpengaruh negative terhadap kemiskinan yang artinya bahwa pengeluaran pemerintah yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan dampak positif terhadap penurunan kemiskinan, Mehmood dan Sadiq (2010) juga mengungkapkan pengeluaran atau pembelanjaan pemerintah dan sumber pembiayaan yang tepat, subsidi tertentu untuk jangka waktu tertentu bersifat produktif dan efisien dapat meningkatkan investasi swasta, kesempatan kerja, sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan mengurangi kemiskinan.

Saat ini 80% negara berkembang memiliki rencana untuk memulai atau memperkuat sistem perlindungan sosial mereka (Bank Dunia, 2012). Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang ditetapkan oleh SDGS pemerintah membentuk tim penanggulangan pengentasan kemiskinan. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan Tim nasional dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan meningkatkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan rentan, serta mengurangi ketimpangan pendapatn antar kelompok (TNP2K.go.id).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan didefinisikan bahwa Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi, menyeluruh untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan memenuhi hak-hak dasar secara layak melalui pembangunan inklusif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Investasi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan. investasi swasta dapat bersaal dari dalam dan luar negeri. Investasi pemerintah dilakukan untuk menyediakan barang public dan investasi swasta baik dari dalam maupun luar negeri dapat menciptakan lapangan kerja. Sehingga masyarakat pendapatannya akan meningkat dan jumlah penduduk miskin akan berkurang (Achyarnis, et.al 2020).

Penanggulangan kemiskinan telah diupayakan oleh pemerintah dengan pengeluaran pemerintah yang terus meningkat tiap tahun dan mengadopsi kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan

pengangguran. Namun apakah hal tersebut efektif menurunkan kemiskinan di Indonesia Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut terkait hubungan pengeluaran pemerintah, investasi serta bagaimana rangsangan Upah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Determinan tingkat kemiskinan di Indonesia ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia ?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia ?
3. Apakah upah minimum provinsi berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pengangguran
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pengangguran

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut :

1. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
2. Kalangan akademisi, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penulisan yang akan datang yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan secara umum adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yakni sandang, pangan dan papan. Menurut Chambers dalam Rahman et al. (2019) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi yaitu kemiskinan (*poverty*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependency*) dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan tidak hanya kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan dan ketidakberdayaan menentukan jalan hidup sendiri.

Menurut Rahman et al., (2019) kemiskinan berdasarkan perspektif ilmu sosiologi: Merupakan suatu keadaan yang terjadi pada seseorang dengan kondisi tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan dalam kelompok sosial, selain itu kemiskinan dianggap tidak mampu memanfaatkan tenaga mental ataupun fisiknya.

Sedangkan dalam perspektif ilmu politik: Masyarakat miskin tidak memiliki sarana politik, tidak memiliki kekuatan politik dan berada dalam status paling bawah yang biasanya banyak negara sedang berkembang menggunakan isu

kemiskinan dan pengentasan kemiskinan sebagai kartu kemenangan pemilihan umum (Rahman et al., 2019); (Suryawati, 2005).

Kemiskinan berdasarkan perspektif ilmu geografi: Ketika mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang geografi ada beberapa hal yang perlu diketahui. Misalnya dimana lokasi kemiskinan tersebut, apakah diwilayah perkotaan atau pedesaan, apakah dikawasan diwilayah perkotaan atau pedesaan, apakah dikawasan industry, pertambangan, wilayah pertanian dan apakah terjadi dinegara berkembang/negara maju. dan juga bagaimana pola persebarannya apakah tersebar diseluruh wilayah atau hanya didaerah tertentu saja. Serta relasi atau keterkaitan antara masalah kemiskinan dengan aspek alamiah dan sosial diwilayah tersebut. seperti ketersediaan sumber daya alam, kualitas penduduk misalnya tingkat pendidikan/penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kesehatan serta prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan dengan wilayah lain disekitarnya (Rahman et al., 2019).

Kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi dalam Teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) sebagaimana yang dikatakan oleh Ragnar Nurkse “ *a poor country is poor because it is poor* ” yang artinya bahwa negara miskin disebabkan masyarakat miskin, modal yang terbatas dengan pasar yang tidak sempurna serta adanya keterbelakangan, menyebabkan produktifitas rendah. Produktifits rendah menyebabkan upah yang diterima rendah. Upah atau pendapatan rendah akan berakibat langsung terhadap konsumsi, tabungan maupun investasi. Rendahnya investasi berdampak kembali pada keadaan awal seperti keterbelakangan dan seterusnya, sehingga jika digambarkan akan membentuk suatu lingkaran (Handayani, 2018). Kemiskinan adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan dasar yang dimana mereka hidup di bawah tingkat pendapatan minimum tertentu (Todaro dan Smith, 2013). Menurut kuncoro dalam Wahyudi (2020), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah. Menurut UNDP orang dapat dikatakan miskin apabila mereka memiliki pendapatan rendah dan tidak memiliki sumber daya lain yang menopang kehidupan dalam memenuhi makanan, barang-barang material, fasilitas standar dan layanan yang memungkinkan mereka bisa memainkan peran dalam kehidupannya, memenuhi kewajiban dan berpartisipasi (Saryana, 2020).

Sedangkan Kemiskinan dalam konsep untuk diamati, diukur dan diperbandingkan. Ada beberapa metode yaitu :

1. Bank dunia

Kemiskinan absolut menurut Bank Dunia adalah orang-orang yang hidup dengan kurang dari \$1 per hari, kemiskinan sedang dengan kurang dari \$2 per hari.

2. Badan Pusat Statistik

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut, garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan

Garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan Kesehatan.

2.1.2 Pengangguran

Pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Undang-undang N0.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Di Indonesia, batas umur minimal untuk tenaga kerja yaitu 15 tahun dan maksimal 64 tahun. Menurut Blanchard and Johnson (2017) Angkatan kerja terdiri dari mereka yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan (menganggur), dan tingkat pengangguran sama dengan rasio jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan pengangguran menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut BPS tingkat pengangguran terbuka merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar angkatan kerja yang mencari pekerjaan.

Menurut Kuncoro dalam Muammil (2018), dengan menggunakan pendekatan angkatan kerja, pengangguran dibagi menjadi tiga jenis. Jenis pertama adalah :

1. pengangguran friksional, jenis yang muncul karena pekerja masih mencari pekerjaan yang sesuai. Yang satu menganggur bukan karena tidak ada pekerjaan. Pengangguran ini tidak menjadi masalah dan dapat diatasi dengan pertumbuhan ekonomi.
2. pengangguran struktural, jenis pengangguran yang muncul karena perubahan struktur dan kondisi ekonomi. Pengangguran sulit diatasi karena dikaitkan dengan strategi pembangunan suatu negara. Namun pengangguran ini dapat diatasi dengan mengadakan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja terampil.
3. pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena faktor musiman, misalnya pekerja industri yang mengandalkan pesanan. Pengangguran ini juga tidak menimbulkan masalah meskipun tidak ada bukti empiris yang mendukungnya

Faktor penyebab timbulnya pengangguran diantaranya adalah (Seran,S 2017):

1. Rendahnya tingkat upah yang berlaku. Tenaga kerja rela untuk tidak bekerja (menganggur) karena tingkat upah yang berlaku rendah, disebut pengangguran sukarela.
2. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja yang diminta (DN) dengan keterampilan penawaran tenaga kerja (SN) yang tersedia
3. Menetap di Desa mempunyai akses yang terbatas terhadap informasi dibanding dengan tenaga kerja yang tinggal-menetap di Kota
4. kekurangan permintaan efektif (effective demand). Keadaan ini cenderung mengurangi keuntungan perusahaan sehingga berpotensi menimbulkan pengangguran, dan kemiskinan

Menurut Suparmoko dalam Kalsum (2017), pengangguran adalah ketidakmampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Jadi dapat disimpulkan pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang sudah tergolong angkatan kerja belum mendapat pekerjaan dan berusaha mencari pekerjaan.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara umum adalah kenaikan umum dalam tingkat barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian suatu negara selama periode waktu tertentu. Menurut Sukirno dalam Kambono dan Marpaung (2020) Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Menurut teori Solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Peningkatan porsi tabungan akan meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatkan investasi yang sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Mendorong kemajuan teknologi dapat meningkatkan pendapatan per angkatan kerja sehingga pemberian kesempatan berinovasi pada sektor swasta akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Solow menjelaskan bahwa investasi, tabungan, pertumbuhan penduduk, dan teknologi mempengaruhi tingkat perekonomian dan pertumbuhannya (AG et al., 2018).

Teori pertumbuhan modern atau juga disebut model pertumbuhan endogen, menyebutkan bahwa faktor produksi yang krusial tidak hanya L dan K, tetapi juga termasuk perubahan pada teknologi (T), Kewiraswastaan (Kw), bahan baku (BB), dan material (Mt). Disamping itu faktor ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum serta peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah (misalnya soal pengeluaran pemerintah), birokrasi dan dasar tukar internasional (ToT). Dengan demikian maka ada perbedaan mendasar, bahwa teori modern menganggap K dan L tidak sebatas jumlah seperti yang berlaku di teori Neoklasik tetapi termasuk kualitasnya. Kualitas L tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan tetapi juga termasuk faktor kesehatan. Model pertumbuhan yang memperhatikan semua unsur, dikenal sebagai model pertumbuhan modern yang endogen (Seran, 2017)

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

Mangkoesoebroto dalam Azwar (2016) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Sukirno dalam Astuti (2018) Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin besar tingkat perekonomian suatu daerah, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan,

tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong produksi domestic.

Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah $Y = C + I + G$. Dimana (Y) adalah pendapatan nasional, (C) pengeluaran konsumsi dan (G) adalah Pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian (Asrudi, 2017).

Berdasarkan UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan anggaran yang digunakan pemerintah dalam membiayai berbagai kegiatan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sangatlah penting untuk mengatur jalannya perekonomian agar tercipta stabilitas pada sistem perekonomian. Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah menyangkut dua hal Belanja Aparatur adalah belanja yang dampaknya tidak secara langsung dapat dinikmati masyarakat dan belanja pelayanan publik merupakan belanja yang manfaat dan dampak secara langsung dapat dinikmati masyarakat. Dalam undang-undang UU nomor 1 tahun 2022 mendorong agar belanja digunakan efektif serta mendukung secara penuh belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur public sehingga memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi masyarakat.

2.1.5 Investasi

Menurut Sunariyah dalam Kurniawan (2016) Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Tambunan dalam Muammil (2018) Investasi sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kegiatan produksi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan pasar.

Dalam teori harrod dommar dikatakan setiap perekonomian harus menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya, jika hanya untuk mengganti barang modal (bangunan, peralatan, dan material) yang sudah usang atau rusak. Namun, untuk tumbuh, diperlukan investasi baru yang mewakili penambahan bersih pada persediaan modal. Jika kita berasumsi bahwa ada beberapa hubungan ekonomi langsung antara ukuran total stok modal (K) dan total GNP (Y), maka setiap penambahan bersih pada stok modal dalam bentuk investasi baru akan membawa peningkatan yang sesuai dalam aliran output nasional atau GNP (Todaro dan Smith, 2013).

2.1.6 Upah

Penentuan tingkat upah dapat dilakukan dengan upah efisiensi yaitu upah yang dibayarkan perusahaan karena ingin pekerjanya lebih productif dan upah yang tinggi dapat membantunya mencaipai tujuan tersebut. Artinya Dampak secara ekonomi yang dimunculkan bagi perusahaan adalah tingginya tingkat

produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, dengan upah yang tinggi maka pekerjapun akan senang dan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dengan hasil yang lebih memuaskan sehingga dengan demikian pekerja akan merasa lebih puas dengan hasil pekerjaannya sedangkan bagi perusahaan merasa tidak mengalami kerugian dengan mempekerjakan tenaga kerja yang trampil dan selalu giat dalam meningkatkan hasil produktivitas kerjanya. Para ekonom menyebutnya teori yang menghubungkan produktivitas atau efisien pekerja dengan upah yang diberikan sebagai teori upah efisiensi (Blanchard dan Johnson, 2017).

Dalam pasar tenaga kerja antara tingkat kenaikan upah memiliki hubungan dengan pengangguran dan tingkat harga dimana $w = P^e F(u, z)$, yang dimana P^e merupakan tingkat harga, u merupakan tingkat pengangguran, dan z yaitu semua variabel yang lain yang dapat mempengaruhi hasil upah, dimana hubungan upah dan pengangguran adalah negative dan hubungan pengangguran dan variabel lain positif. Penentuan upah menyiratkan hubungan negatif antara upah riil (w), dan tingkat pengangguran (u). Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah upah riil yang dipilih oleh pembuat upah. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin lemah posisi tawar pekerja, dan semakin rendah upah riilnya (Blanchard dan Johnson, 2017).

Menurut Sukirno dalam Manginsih., Naukoko., et.al (2022) teori ekonomi upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.

Upah dalam UU No. 13 tahun 2003 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan

Hubungan besaran upah yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran dijelaskan oleh Kaufman dan Hotckiss dalam Dinar dan Hasan, (2018) Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu (Lestari et al., 2017):

1. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja. Dalam UU No. 13 tahun 2003 kebijakan utama dari upah minimum adalah untuk

melindungi pekerja dari tingkat upah yang rendah, terutama pada saat tingkat penawaran tenaga kerja besar sehingga tingkat upah tidak akan terus mengalami penurunan yang akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Upah minimum juga diharapkan dapat memenuhi kehidupan yang layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

2. Upah Riil, adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang didapatkan dari pertukaran tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh. Upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

2.2 Hubungan Variabel

2.2.1 Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran

Alokasi anggaran pemerintah adalah salah satu instrumen penting yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara absolut. Kebijakan publik khususnya dari sisi pengeluaran dapat memengaruhi kemiskinan melalui dua cara. Pertama, pengeluaran publik dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi dimana penduduk miskin dapat terkena dampak positifnya. Kedua, pengeluaran publik tersebut dapat meningkatkan kesempatan masyarakat miskin untuk berkontribusi dalam proses pertumbuhan tersebut (Aisyah, 2021). Hal tersebut sesuai dengan pendekatan

Keynessian dimana pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat separuh kesenjangan kemiskinan melalui perlindungan sosial (Fiszbein et al., 2014).

Menurut Barro (1990) dalam pertumbuhan endogen memprediksi bahwa hanya belanja pemerintah yang produktif dan positif akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan jangka panjang. Barro membagi Pengeluaran pemerintah menjadi produktif dan tidak produktif, apabila pengeluaran tersebut mempunyai efek positif langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan mampu meningkatkan produksi dan efisiensi tenaga kerja sehingga mendorong pertumbuhan, maka pengeluaran tersebut produktif. Pengeluaran pemerintah untuk non produktif berkorelasi dengan pendapatan per kapita yang rendah. Pengeluaran pemerintah yang tidak produktif berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan Penelitian Asrudi (2017) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang produktif dan meningkatkan lapangan pekerjaan profitabilitas investasi melalui multiplier effect agregat demand dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang (Marini, 2016)

Teori Musgrave (Amire, 2020) berpendapat bahwa pengeluaran public merupakan prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi. Sektor public pada awalnya menyediakan infrastruktur ekonomi seperti jalan, kereta api, pasokan air dan sanitasi. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi, keseimbangan investasi public bergeser kearah pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan pengeluaran untuk layanan pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan. Dalam teori Romer dalam Yusri (2022) menggaris bawahi pengeluaran untuk sektor Kesehatan dan pendidikan dianggap mengembangkan modal manusia, menghasilkan kemajuan teknis endogen dan menciptakan pertumbuhan ekonomi

Menurut Agussalim dalam Hatta dan Azis (2017) pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan suatu kebijakan yang pro poor yang mempunyai dampak yang negatif terhadap kemiskinan melalui dampaknya terhadap pertumbuhan dan pemerataan. Di samping itu, kebijakan pengeluaran tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan melalui dampaknya terhadap pembentukan modal manusia (human capital). Kebijakan inilah yang yang dianggap sebagai kebijakan yang berdampak ganda (win win policies)

Pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Menurut pendekatan Keynesian, pengeluaran publik dapat meningkatkan permintaan agregat yang selanjutnya merangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja (Mehmood dan Sadiq, 2010). Keynes juga berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta sehingga perlu dilakukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh (Sukirno, 2004 dalam Jirang et al., 2014). Salah satu bentuk campur

tangan yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan kebijakan fiskal. Dalam hal ini Keynes mengisyaratkan kebijakan fiskal yang ekspansif melalui pengurangan pajak dan penambahan pengeluaran pemerintah (government expenditure). Dalam hukum okun mengindikasikan hubungan negative antara antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran yaitu hukum okun menjelaskan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan negative dengan gdp riil. ketika pertumbuhan ekonomi naik maka pengangguran turun hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang naik disebabkan oleh banyaknya lapangan pekerjaan yang dapat diserap baik oleh tenaga kerja yang tersedia (Corolina dan Panjawa, 2020), hal itu didukung oleh penelitian Muminin dan Hidayat (2017) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian yang dilakukan Wijaya dan Irwansya (2021) Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Hubungan ini dijelaskan dengan capaian pertumbuhan ekonomi di Kaltim yang setidaknya mampu mengurangi kemiskinan, dimana peningkatan tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari daya beli atau kemampuan konsumsi masyarakat yang meningkat.

Menurut Frederico (World bank,2018) Untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, Indonesia perlu melakukan belanja lebih efektif untuk pendidikan, membelanjakan lebih banyak di bidang prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, bantuan sosial, serta mengumpulkan lebih banyak pendapatan dengan cara efisien dan mendukung pertumbuhan agar belanja meningkat.

Tugas utama pemerintah di negara berkembang adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dilihat dari pengeluaran pemerintah/investasi pemerintah secara langsung di berbagai

bidang. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan pada sektor publik yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Investasi pemerintah pada kedua sektor publik tersebut akan meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan handal serta memperbaiki standar kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Wahyudi, 2020).

Zulhanafi et al., (2013) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara signifikan mempengaruhi pengangguran. Jika pengeluaran pemerintah meningkat, seperti belanja modal untuk perbaikan infrastruktur, maka akan meningkatkan output, dan peningkatan output akan meningkatkan permintaan terhadap faktor-faktor produksi, salah satunya adalah tenaga kerja; dengan demikian, situasi seperti itu akan menyebabkan penurunan tingkat pengangguran. Sebaliknya jika pengeluaran pemerintah menurun maka akan menghambat proses produksi barang dan jasa (output) sehingga permintaan faktor produksi juga akan menurun sehingga menyebabkan tingkat pengangguran meningkat. Artinya semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka akan semakin rendah pengangguran terbuka. Sejalan dengan Saraireh (2020) menemukan hubungan jangka panjang yang negatif dan signifikan secara statistik antara pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran di Yordania.

Berdasarkan data perlindungan sosial global, memperkirakan bahwa program perlindungan sosial yang saat ini mencegah 150 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan. Bahkan jika semua negara-negara berpenghasilan rendah bisa mencapai efisiensi penargetan yang terbaik yang diamati dunia, hanya 50% yang dapat mengurangi separuh kesenjangan kemiskinan melalui perlindungan sosial

(Fiszbein et al., 2014). Penelitian Falade dan Babatunde (2020) mengungkapkan bahwa belanja modal pemerintah berpengaruh negative baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan yang menyiratkan bahwa belanja modal dapat digunakan secara efektif untuk memerangi momok kemiskinan langsung di Nigeria.

2.2.2 Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan

Mankiw dalam Sulaksono (2015) menyatakan investasi dapat menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang akan mendorong peningkatan volume produksi yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Todaro mengungkapkan Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja (A. B. Purnomo dan Kusreni, 2019)

Menurut Ocaya et al., (2012) Penurunan tingkat kemiskinan disebabkan adanya investasi, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Apabila semua tenaga kerja berkualitas terlibat aktif dalam perekonomian, akan meningkatkan output barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Pack, H. dan J. Page dalam Seran., S (2017) dalam studi empirisnya menyatakan bahwa terdapat dua sumber utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan produktivitas. Investasi berkaitan dengan pemakaian faktor produksi modal (K). Sedangkan produktivitas merujuk pada peningkatan produktivitas melalui kemajuan teknologi. Peningkatan produktivitas dari masing-masing faktor produksi dapat dihitung secara parsial, atau dihitung secara total untuk semua input produksi.

UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan investasi baik investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga akan pemeratakan dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara kontinu yang disebut sebagai pembangunan ekonomi. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri.

Menurut Harrod-Domar, investasi merupakan kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi investasi di suatu daerah maka semakin tinggi pula investasinya, pengangguran akan berkurang, jika tingkat pengangguran rendah maka akan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan (Fosu, 2017).

Penelitian Muammil (2018) menunjukkan bahwa investasi swasta memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap pengangguran di Indonesia, mengungkapkan peningkatan investasi swasta akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori Harrod-Domar yang melihat pengaruh investasi dalam perspektif jangka panjang. Menurut kedua ekonom tersebut, pengeluaran investasi (I) tidak hanya berpengaruh (melalui proses pengganda) terhadap permintaan agregat (Z), tetapi juga terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi guna mengurangi pengangguran. Besarnya investasi di suatu daerah tentunya akan berdampak pada jumlah pengangguran di daerah tersebut, karena investasi tersebut akan membantu untuk memperluas usaha melalui peningkatan modal yang digunakan dan tenaga kerja yang digunakan. Dengan demikian, diharapkan investasi dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Achyarnis, et. al (2020) menjelaskan kegiatan investasi memungkinkan masyarakat untuk terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja. meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat. menyebabkan jumlah kemiskinan berkurang. Pernyataan ini didasarkan penelitiannya tentang Determinants of Poverty in Central Java Province 2013-2018 hasil penelitiannya yaitu investasi berpengaruh negative terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi jawa tengah.

Iacovoiu (2012) menjelaskan bahwa pengaruh investasi tidak hanya bergantung pada besarnya, tetapi juga sangat tergantung pada berbagai hal seperti ketepatan alokasi dana investasi pada berbagai bidang yang ada. kondisi sosial ekonomi yang ada dan kontribusi investor terhadap pembentukan lahan usaha yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek, investasi akan menciptakan

lapangan kerja baru, dan jangka Panjang panjan akan mendorong peningkatan kinerja ekonomi pengusaha swasta sehingga mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan Pernyataan ini didasarkan pada penelitiannya tentang fenomena investasi dan pengangguran di Rumania pada tahun 2004-2012 hasil penelitiannya yaitu peningkatan tingkat investasi sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran (Iacovoiu, 2012). Begitupun Umam dan Wardhana (2020) mengungkapkan investasi berpengaruh negative terhadap pengangguran yang artinya setiap kenaikan investasi akan mengurangi pengangguran.

Penelitian Islamiah et al., (2021) menggambarkan hubungan antara investasi dan pengangguran menjelaskan bahwa efek yang ditimbulkan antara investasi terhadap besarnya tingkat pengangguran baik di wilayah Indonesia bagian barat dan timur ini adalah sama sama berpengaruh negatif dan signifikan pernyataan ini didasarkan pada penelitiannya tentang Intervensi Variabel Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada periode 2003-2018. Menyimpulkan Investasi pemerintah melalui PMDN dan PMLN dapat menjadi persyaratan umum untuk pembangunan ekonomi suatu negara yang bersifat akumulasi terhadap modal. Investasi dan keterkaitannya terhadap pengurangan tingkat pengangguran dapat diekstraksi melalui alokasi peralatan fisik dan sumber daya manusia; serta penyiapan teknologi. Melalui investasi pemerintah, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi potensi pengangguran, dan sebagai upaya ekspansi dalam hal kegiatan perekonomian.

2.2.3 Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan

Menurut Sukirno dalam Budiarto. dan Kartika I., (2019), pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat. Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk baik terhadap perekonomian, individu dan masyarakat seperti tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga timbul kemiskinan, dan masalah social lainnya. Maka dari itu untuk mendapatkan upah seseorang harus bekerja dan produktifitasnya akan meningkat.

Teori Klasik memberikan penejelasan bahwa pengangguran dapat dicegah dengan memberikan stimulus pada sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas untuk menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap seluruh penawaran. Menurut klasik, pengangguran terjadi karena misalokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga. Akan tetapi menurut Keynes bahwa pada dasarnya masalah pengangguran disebabkan oleh permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh produksi yang rendah tetapi konsumsi yang rendah. Menurut Keynes, hal ini tidak bisa dialihkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat maka upah akan turun dan hal ini akan merugikan karena penurunan upah berarti turunnya tingkat daya beli masyarakat terhadap berbagai komoditi. Pada akhirnya dampak tersebut akan menyebabkan produsen mengalami kerugian dan penurunan penyerapan tenaga kerja (Umam dan Wardhana, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Tambunsaribu dan Mudakir (2013) Dari hasil regresi, diperoleh hasil koefisien kemiringan upah riil (WP) signifikan secara statistik artinya bahwa adanya kenaikan 1% satuan upah riil akan menyebabkan kenaikan penyerapan tenaga kerja wilayah sebesar 1,04%. Dari hasil penelitian, didapat bahwa upah riil berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga hendaknya kedepannya para pelaku usaha lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerja melalui pemberian intensif atau bonus dalam meningkatkan produktivitas, sehingga dapat meningkatkan produksi yang akhirnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan Hasanah (2021) mengungkapkan Pengaruh variabel upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat periode 2008-2020 yang menunjukkan hasil signifikansi terhadap ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat. Sehingga jika upah minimum meningkat maka akan berdampak besar pada peningkatan produktivitas dan akan menciptakan loyalitas pekerja yang dapat membuat pekerja lebih berkualitas. Stevens Philip dalam Seran (2017) dalam penelitian tentang Negara-negara G7 menemukan bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan output. Makin tinggi kualitas tenaga kerja makin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas tenaga kerja di Jepang misalnya sebesar 1.16 persen mampu menyumbang pertumbuhan output sebesar 0.79 persen, dan pertumbuhan output perkapita sebesar 5.39 persen. Penelitian Res (2018) Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, atau peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat menyebabkan kenaikan upah minimum menggunakan data dari 16 negara OECD antara tahun

1995 dan 2011, menyelidiki hubungan antara upah minimum dan produktivitas tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Murtala et al., (2020) dengan judul penelitian upah riil dan kesempatan kerja mengungkapkan bahwa upah riil berpengaruh negative terhadap kesempatan kerja di Indonesia hal ini disebabkan peningkatan upah riil yang terjadi tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas yang seimbang sehingga peningkatan upah riil mendorong pengurangan permintaan akan tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiarto. dan Kartika I., (2019) mengungkapkan bahwa upah minimum berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran, dikarenakan peningkatan upah minimum yang relative stabil akan memberikan kemampuan pada perusahaan, sektor ekonomi dan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usaha dan mengembangkan usahanya. Ketika usaha yang ada meningkat dan berkembang maka perusahaan atau usaha dapat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Dan upah minimum berpengaruh negative signifikan secara langsung terhadap kemiskinan di yang berarti Peningkatan UMK setiap tahunnya oleh pemerintah memberikan dampak yang baik pada penduduk yang kurang mampu serta meningkatkan keinginan masyarakat untuk mencari pekerjaan. Penelitian Oktaviani dan A'yun (2021) mengungkapkan bahwa Ketika upah minimum tinggi, masyarakat akan mendapatkan lebih banyak pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan baik.

Penelitian oleh Campolieti et al., (2012) di Kanada, Mereka menemukan bahwa tingkat upah, yang biasanya diukur dengan upah minimum, tidak

memengaruhi tingkat kemiskinan. Upah minimum hanya digunakan sebagai retorika politik, yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. Orang miskin biasanya bekerja di bawah target produktivitas, sehingga meskipun upah minimum ditetapkan, karena produktivitas rendah, upah minimum mereka akan tetap rendah dan karenanya tetap miskin. Penelitian Feriyanto, et. al (2020) mengungkapkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat miskin Indonesia periode 2010-2019. Kemiskinan di Indonesia banyak terjadi pada masyarakat yang bekerja di sektor informal yang pekerjaannya relatif tidak terampil dan padat karya, seperti pedagang kaki lima. Penghasilan dari pekerjaan sehari-hari digunakan untuk biaya hidup. Jika seseorang tidak bekerja, mereka tidak akan mendapatkan penghasilan harian dan tetap termasuk dalam kelompok miskin. Oleh karena itu, bahkan jika upah naik, mereka tidak akan mencapai tingkat pekerja harian yang pendapatannya bergantung pada pekerjaan yang dibayar. Dengan kata lain, upah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan pro-miskin mengacu pada strategi pembangunan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dengan peningkatan bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Pertumbuhan pro-miskin tidak mewakili pilihan anatar pro-pertumbuhan dan pro-miskin, strategi tersebut menyerukan untuk menggabungkan pertumbuhan yang lebih cepat dengan peningkatan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan tersebut (Perkins et al., 2015). Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang/jasa yang dihasilkan meningkat. Dengan demikian diperlukan tenaga kerja semakin banyak untuk memproduksi

barang/ jasa tersebut sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun (Yacoub, 2012). Pertumbuhan ekonomi, akan menciptakan investasi, membuka lapangan kerja, menyerap angkatan kerja, yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat kemiskinan (Seran, 2017)

Pertumbuhan ekonomi akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin jika pertumbuhan ekonomi disertai dengan kebijakan yang tepat, seperti penegakan hukum, disiplin fiskal, keterbukaan perdagangan, dan strategi pengentasan kemiskinan (Dollar dan Kray, 2001). Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan dan merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan dari beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu sebelumnya (Budhi, 2013). Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin (Pratama dan Utama, 2019).

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan atau yang biasa disebut *necessary condition* bagi pengentasan kemiskinan, dan hendaknya memenuhi syarat kecukupan atau *sufficient condition* ialah pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan termasuk golongan penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bilamana pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin (Kamil, 2011). Penelitian yang dilakukan Sumiyarti (2022) menyimpulkan bahwa aktifitas ekonomi dalam hal ini pertumbuhan ekonomi menjadi modal yang diperlukan atau prasyarat terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan, hal tersebut didasarkan pada hasil penelitiannya yang berjudul

pengaruh belanja modal dan belanja bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan periode 2010-2017 pada 33 provinsi di Indonesia. Sejalan dengan penelitian (Wijaya dan Irwansya, 2021). Sedangkan Rahma et al. (2021) PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan hasil tersebut didasarkan pada penelitiannya mengenai determinan of poverty in Indonesia periode 2015-2019.

2.2.5 Pengangguran dan Kemiskinan

Menurut Todaro Standar hidup yang rendah dimanifestasikan secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim, atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang relative sangat singkat dan peluang mendapatkan kerja yang rendah (Todaro dan Smith, 2013).

Menurut Nurkse dalam Ridlo dan Sari (2020) salah satu faktor penyebab terjadinya siklus kemiskinan adalah adanya hambatan dalam proses pembentukan modal yang sangat kuat. Menurut kuncoro dalam Ridlo dan Sari (2020) Dalam hal ini, ada dua jenis lingkaran kemiskinan yaitu dalam hal penawaran modal jika tingkat produktifitas rendah maka mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan, tingkat pendapat rendah mengakibatkan daya beli menurun sehingga permintaan barang rendah. Hal ini berdampak pada kemampuan masyarakat untuk menabung. Jika jumlah tabungan sedikit maka pembentukan modal suatu barang akan terganggu, akibatnya suatu negara akan kekurangan barang modal, (2) dalam hal permintaan modal, dimana faktor-faktor yang membuat investasi menjadi rendah karena terbatasnya luar pasar. Untuk berbagai jenis barang, artinya karena

pendapatan rendah dan produktifitas yang rendah yang disebabkan pembentukan modal yang rendah karena penggerak investasi yang terbatas.

Kemiskinan penduduk dapat terjadi karena penduduk usia kerja yang tidak dapat bekerja (penganggur), sebagai akibat dari rendahnya Pendidikan, efek selanjutnya adalah mengurangi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan penduduk. Hasil penelitian Seran (2017); Yolanda et al., (2020) mengungkapkan bahwa variabel pengangguran mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kemudian Nurdiana et al., (2020) mengungkapkan berdasarkan penelitiannya bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan variabel pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi selatan periode 2009-2018. Purnomo (2019) mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di daerah khusus Yogyakarta 2013-2017.

Menurut Marmujiono dalam Achyarnis, et.al (2020) dampak buruk dari pengangguran adalah berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada gilirannya menurunkan tingkat kesejahteraan yang telah dicapai seseorang. Menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat pengangguran akan memperbesar peluang mereka untuk terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Jika pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu terjadi dan berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang.

Dalam penelitian Supto dan Subayil (2020) mengungkapkan hasil pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dan juga Probosiwi (2016) dalam penelitiannya bahwa pengangguran dan kemiskinan menunjukkan

pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan tidak ada kaitan langsung antara pengangguran dan kemiskinan di Yogyakarta yang dapat disebabkan karena pengangguran merupakan kelompok terdidik yang sedang mencari pekerjaan dan tidak termasuk dalam kelompok masyarakat miskin.

Osinubi (2005) hasil temuannya menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang menyiratkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran mengurangi kemiskinan di Nigeria, dan peningkatan tingkat kemiskinan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan fakta bahwa ketika orang menjadi pengangguran, banyak yang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan tidak tetap yang secara resmi tidak dianggap sebagai pekerjaan. Pekerjaan tidak teratur ini membuat banyak pekerja menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka dan membawa mereka keluar dari kemiskinan. Beberapa pekerja yang menjadi pengangguran di Nigeria bergantung pada kerabat mereka yang tidak miskin untuk bertahan hidup dan membawa mereka keluar dari kemiskinan. Implikasinya ketika orang menjadi miskin mereka cenderung menerima pekerjaan dengan upah yang sangat rendah. Achyarnis, et.al (2020) mengungkapkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh karena tingginya tingkat pendapatan keluarga yang mampu menghidupi biaya hidup keluarga yang masih pengangguran. Mereka hanya akan mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan bidang dan tingkat pendapatan yang diinginkan saja. Penelitian Yarlina Yacoub (2012) mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan negative dan signifikan di Provinsi Kalimantan barat disebabkan sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian melibatkan hampir seluruh keluarga akan tetapi dengan penghasilan

yang rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga walaupun tingkat pengangguran rendah akan tetapi mereka tetap miskin (Yacoub, 2012)

Mohammad dan David (2019) mengungkapkan adanya hubungan proporsional antara kemiskinan dan pengangguran, yang menunjukkan adanya kemungkinan kausalitas antara pasangan. Merekomendasikan tindakan pembuat kebijakan dalam menciptakan program keterampilan kejuruan untuk membantu mengatasi masalah pengangguran di negara bagian. Dengan demikian, peningkatan pengeluaran untuk pendidikan dan upah minimum juga direkomendasikan.

2.3 Tinjauan Empiris

Peneliti Sanjaya, dan Jember (2019) meneliti Pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi bali. teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi. Pengangguran secara langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi pengaruh investasi terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan.

Peneliti D. W. Puspita (2015) meneliti Determinan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2012 menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian variabel pengangguran, pdrb dan populasi signifikan terhadap tingkat

kemiskinan. Variabel prdb mempunyai pengaruh negative, variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Peneliti meneliti Yolanda, Irshad, Mukarramah et al. (2020) Anlysis of the effect of investment and unemployment on economic growth and poverty in north Sumatra province. Menggunakan data panel dengan periode 2014-2018 dengan metode path analysis. Hasil berdasarkan menunjukkan bahwa secara langsung variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan. Investasi memiliki pengaruh yang signifikan pada kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan investasi memiliki pengaruh negative melalui pertumbuhan ekonomi. Variabel pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Peneliti Budiarto. dan Kartika I. (2019) meneliti Determinan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kawasan Sarbagita, dengan metode OLS, menemukan belanja modal dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. belanja modal dan upah berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pengangguran.

Penliti Feriyanto, El Aiyubbi, Nurdany (2020) dengan judul Tthe impact of unemployment, minum wage, and real gross regional domestic product on poverty reduction in provinces of indonesia periode 2010-2019 menggunakan data panel

menggunakan Fixed effect model menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh tidak signifikan, pdrb riil berpengaruh negative terhadap kemiskinan.

Peneliti Marinda et al. (2017) dengan judul *The analysis of the economic growth, minimum wage, and unemployment rate to the poverty leve in East Java* menggunakan data panel periode 2012-2014 dan cross section 29 kabupaten, hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Peneliti Febriandika, Rahayu, and Kumar (2022) dengan judul *The determinant factors of poverty in eastern Indonesia : evidence from 12 province 2010-2018*. Menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan upah minimum berpengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin. sementara untuk pendidikan, investasi, tingkat partisipasi tenaga kerja, dan indeks gini tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di KTI.

Peneliti Sasana dan Kusuma (2018) dengan judul *Government expenditure and poverty in Indonesia*, adapun data yang digunakan yaitu 33 provinsi di Indonesia periode 2008-2013, menggunakan Fixed effect model (FEM), hasil penelitian menemukan bawa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia, Sedangkan Pengeluaran pemerintah, pendapatan per kapita, partisipasi Angkatan kerja berpengaruh negative terhadap kemiskinan di Indonesia.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Teori kemiskinan Nurkse menjelaskan bahwa masyarakat miskin, karena modal yang terbatas, keterbelakangan, produktifitas yang rendah sehingga upah yang diterima juga rendah, upah atau pendapatan rendah akan berakibat langsung terhadap konsumsi dan tabungan, Ketika konsumsi rendah akan berdampak pada permintaan akan barang dan jasa menurun, maka akan berdampak juga pada meningkatnya angka pengangguran karena adanya penurunan produksi yang mengakibatkan menurunnya kebutuhan akan sumber daya manusia. Ketika orang menganggur, mereka akan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga akan berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan. Dalam lingkaran setan kemiskinan ini masyarakat hidup dalam suatu lingkaran kemiskinan yang tidak berujung karena aksesibilitas yang terbatas atau tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan. Pengentasan kemiskinan sangat penting untuk dilakukan karena apabila mata rantai kemiskinan tidak diputus maka kemiskinan tersebut akan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kebutuhan manusia banyak dan beragam, karena itu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang biasa dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, kondisi ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah penduduk miskin yang ada dan sangat mungkin bagi seseorang untuk bekerja akan tetapi tetap miskin, untuk itu pendapatan/upah berperan untuk mengeluarkan

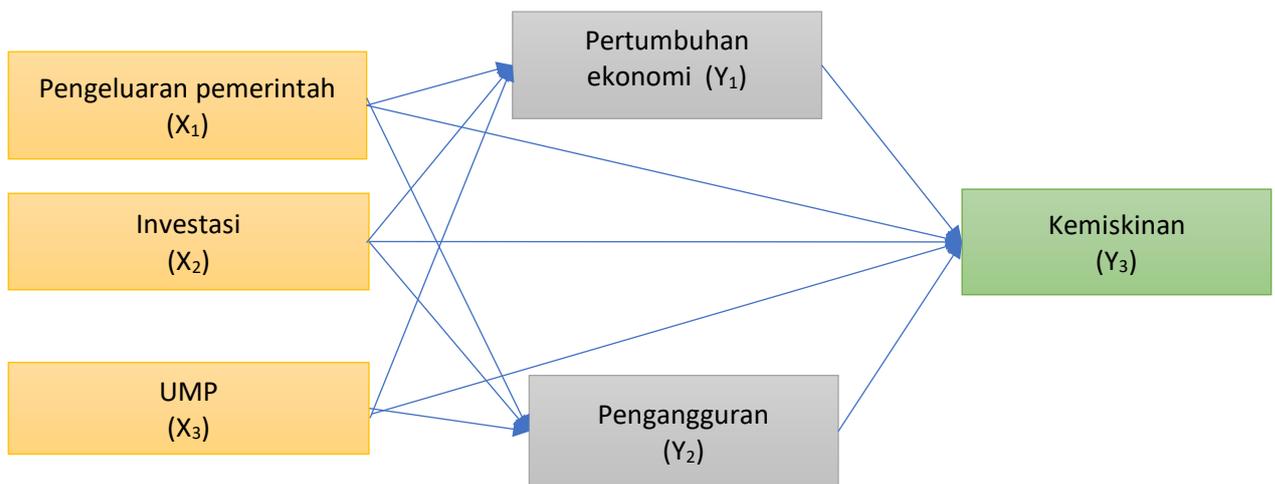
seseorang dari kemiskinan karena dengan upah tersebut masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dan keluar dari kemiskinan. Dengan adanya perbaikan/peningkatan upah maka bisa membantu untuk memenuhi kebutuhannya serta dengan upah dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja serta dengan adanya perbaikan upah dorongan untuk memperoleh pekerjaan atau mencari pekerjaan akan meningkat.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah terus naik dari tahun ke tahun dengan harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah juga tidak hanya melihat jumlahnya saja tapi juga melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah. Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui pengeluaran pemerintah diharapkan mampu untuk membantu aksesibilitas masyarakat keluar dari kemiskinan. Selain pengeluaran pemerintah, investasi juga berperan penting. Investasi dapat menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang akan mendorong peningkatan volume produksi yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi akan selalu terjadi apabila adanya pengeluaran dan investasi yang bertambah secara terus menerus maka akan merespon secara otomatis pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang pro poor yang diharapkan dapat menyebar setiap golongan masyarakat termasuk golongan penduduk miskin. Disamping hal tersebut dengan adanya pengeluaran pemerintah, investasi tentunya akan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu menopang dan mendorong

terjadinya pertumbuhan ekonomi. yang kemudian diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan begitupun dengan kemiskinan.

Adapun kerangka konseptual penelitian digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

1. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh negative terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

Berdasarkan hipotesis di atas, maka dapat dijabarkan lebih lanjut dalam tiga rumusan hipotesis yaitu:

H1a : Diduga pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh negative terhadap kemiskinan

H1b : Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh negative terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi

H1c : Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh negative terhadap kemiskinan melalui pengangguran

2. Diduga investasi berpengaruh negative terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pengangguran

Berdasarkan hipotesis di atas, maka dapat dijabarkan lebih lanjut dalam tiga rumusan hipotesis yaitu:

H2a : Diduga Investasi secara langsung berpengaruh negative terhadap kemiskinan

H2b : Diduga Investasi berpengaruh negative terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi

H2c : Diduga Investasi berpengaruh negative terhadap kemiskinan melalui pengangguran

3. Diduga upah minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

Berdasarkan hipotesis di atas, maka dapat dijabarkan lebih lanjut dalam tiga rumusan hipotesis yaitu:

H3a : Diduga upah minimum Provinsi (UMP) secara langsung berpengaruh negative terhadap kemiskinan

H3b : Diduga upah minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negative terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi

H3c : Diduga upah minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negative terhadap kemiskinan melalui pengangguran.